

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Media saat ini tampil sebagai jembatan informasi terhadap masyarakat, media juga memiliki peran yang penting dalam kehidupan berdemokrasi. Bahkan media saat ini dapat dikatakan menjadi pilar utama dalam berdemokrasi. Lebih jauh lagi media saat ini telah mampu mengkonstruksi pandangan masyarakat terhadap wacana yang berkembang melalui penyajian beritanya. Media juga dapat berfungsi untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk disampaikan kepada masyarakat apabila terjadi penyimpangan dalam pengimplementasiannya, seperti korupsi, suap, dan lain-lain. Peran dan fungsi media yang semakin kuat ini telah membawa media sebagai pilar keempat dalam demokrasi setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Junaedi, 2007:14).

Pada September 2019 lalu, terjadi aksi demo mahasiswa menolak diberlakukannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Kemudian aksi demo mahasiswa ini menjadi salah satu berita yang cukup besar di Indonesia pada tahun 2019, selain beberapa insiden aksi demo lainnya seperti aksi demo pendukung paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi yang terjadi di bulan Mei 2019.

Terjadinya aksi demo mahasiswa ini berawal dari adanya Revisi UU KPK yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna kesembilan tahun sidang 2019-2020, pada Selasa 17 September 2019 bertempat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190917121442-32-431182/dpr-resmi-sahkan-revisi-uu-kpk> di akses pada tanggal 23 Juni 2020, pada pukul 09.22 WIB).

Sedangkan RUU KUHP, dan RUU lainnya yang juga semulanya sudah siap disahkan namun, DPR RI menunda pengesahan tersebut karena mendapat usulan dari Presiden RI Joko Widodo (<https://tirto.id/penyebab-demo-mahasiswa-hari-ini-dan-respons-jokowi-soal-ruu-kuhp-eiAV>) di akses pada tanggal 23 Juni 2020, pada pukul 10.12 WIB).

Adapun pasal kontroversial Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang memicu mahasiswa untuk menggelar aksi unjukrasa, yaitu:

Pertama, pasal RUU KUHP soal korupsi. *Kedua*, pasal RUU KUHP tentang penghinaan Presiden. *Ketiga*, pasal RUU KUHP tentang makar. *Keempat*, pasal RUU KUHP tentang penghinaan bendera. *Kelima*, pasal RUU KUHP terkait alat kontrasepsi. *Keenam*, pasal RUU KUHP soal aborsi. *Ketujuh* pasal RUU KUHP soal gelandangan. *Kedelapan*, pasal RUU KUHP tentang zina dan kohabitasi. *Kesembilan*, pasal RUU KUHP soal pencabulan. *Kesepuluh*, pasal pembiaraan unggas dan hewan ternak. *Kesebelas*, tindak pidana narkoba. *Keduabelas*, pasal tentang *contempt of court*. *Ketigabelas*, pasal tindak pidana terhadap agama. *Keempatbelas*, pasal terkait pelanggaran HAM berat (pasal 598-599) (Addi M Idhom, 'Isi RUU KUHP dan Pasal Kontroversial Penyebab Demo Mahasiswa Meluas', tirto.id, 25 September 2019). Dari empat belas pasal kontrovesial RKUHP di atas, mahasiswa menilai UU KPK yang baru dianggap akan melemahkan pemberantasan korupsi yang ada di tanah air, sebab sejumlah kelebihan KPK dipreteli pada UU KPK yang baru semisal tentang penyadapan dan operasi tangkap tangan yang harus meminta izin Dewan Pengawas. Sementara itu, pengesahan RUU KUHP juga dinilai akan membawa mundur demokrasi di Indonesia. Sebab, sejumlah pasal di RUU KUHP dinilai bertentangan dengan kebebasan berpendapat dan demokrasi. Salahsatunya soal pasal penghinaan terhadap Presiden.

Perkembangan kejadian aksi demo mahasiswa yang terjadi di berbagai kota yang ada di Indonesia ini tidak terlepas dari peranan media yang selalu memantau dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan kejadian tersebut. Melalui media juga,

masyarakat akhirnya mengetahui seluk beluk kejadian ini yang sebelumnya tidak terungkap ke publik. Dalam pemberitaan aksi demo mahasiswa ini, setiap media memiliki ciri khas dan perbedaan masing-masing secara langsung maupun tidak langsung, dapat dikatakan sikap redaksi dan institusi menanggapi atas aksi demo mahasiswa tersebut masing-masing berbeda. Media sebagai penyampaian pesan kepada masyarakat, memiliki peran penting dalam membentuk opini publik atau persepsi masyarakat terhadap sebuah kasus atau kejadian.

Di antara sekian banyak media yang rutin mengikuti perkembangan dan selalu *up date* untuk memberitakannya kepada khalayak adalah dua surat kabar terkemuka di Indonesia, yaitu koran Jawa Pos dan koran Kedaulatan Rakyat. Hal tersebut terlihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Pemberitaan Aksi Demo Mahasiswa di Koran Jawa Pos dan Kedaulatan Rakyat

No.	Koran Jawa Pos		Koran Kedaulatan Rakyat	
	Tanggal Berita	Judul Berita	Tanggal Berita	Judul Berita
1.	Selasa, 24 September 2019.	1. Serentak Menggugat Rezim.	Selasa, 24 September 2019.	1. 'Gejayan Memanggil' Bebas Intervensi Politik. 2. Jokowi: Silahkan Masyarakat Beri Masukan.
2.	Rabu, 25 September 2019.	1. Mahasiswa Babak Belur.	Rabu, 25 September 2019.	1. Polisi Tembakkan Gas Air Mata, DPR Tunda Pengesahan RKUHP.
3.	Kamis, 26 September 2019.	1. Perlawanan Terus Berlanjut. 2. Pemerintah Sebut Perppu KPK Tidak Mendesak.	Kamis, 26 September 2019.	1. Komnas HAM Mencatat Adanya Kekerasan, Kerusuhan Bukan Perbuatan Mahasiswa. 2. Terkait RUU KUHP, DPR Bakal Tinjau Kembali.

4.	Jum'at, 27 September 2019	1. Jangan Ragu Rilis Perppu. 2. Jokowi Tolak Terbitkan Perppu.	Jum'at, 27 September 2019	1. Jokowi Pertimbangkan Terbitkan Perppu KPK.
----	---------------------------	---	---------------------------	---

Sumber: Koran Jawa Pos dan Kedaulatan Rakyat Edisi 24-27 September 2019.

Dari tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019 surat kabar Jawa Pos memberitakan kasus ini sebanyak 6 kali, sedangkan surat kabar Kedaulatan Rakyat memberitakan aksi demo mahasiswa sebanyak 7 kali.

Dalam memberitakan kejadian ini, setiap media memiliki cara pandangnya masing-masing. Sikap masing-masing redaksi dan institusi media terhadap kejadian ini masing-masing berbeda, peristiwa boleh saja sama tetapi sudut pandang dari masing-masing redaksi dan institusi pastilah berbeda. Begitu juga dengan surat kabar Jawa Pos dan surat kabar Kedaulatan Rakyat. Berita pada surat kabar Jawa Pos edisi 24 September 2019, judul yang diberikan yaitu *“Serentak Menggugat Rezim”*, yang isinya adalah aksi demo mahasiswa serentak terjadi di berbagai kota yang ada di Indonesia menuntut batalkan UU KPK dan RUU kontroversial. Sedangkan surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi 24 September 2019, judul yang diberitakan berbunyi *“Gejayan Memanggil Bebas Dari Intervensi Politik”*, yang isinya adalah aksi demo mahasiswa yang dilakukan di Yogyakarta murni terjadi karena mahasiswa resah dengan adanya kebijakan dari pemerintah, bukan karena adanya kepentingan politik lain. Judul berita kedua berbunyi *“Jokowi: Silahkan Masyarakat Beri Masukan”* yang isinya beritanya adalah Presiden Jokowi meminta mahasiswa dan masyarakat memberi masukan langsung kepada DPR terkait pasal-pasal bermasalah dalam RUU. Koran Jawa Pos dan Kedaulatan Rakyat memberitakan topik yang sama yaitu tentang aksi demo mahasiswa, akan

tetapi mereka memberitakannya dengan berbeda, berita pada koran Jawa Pos lebih banyak menampilkan pergerakan mahasiswa untuk dijadikan berita sedangkan koran Kedaulatan Rakyat lebih banyak menampilkan tanggapan dari pemerintah atas adanya demo tersebut.

Pada pemberitaan tersebut koran Jawa Pos dan Kedaulatan Rakyat juga minta komentar dari beberapa narasumber. Koran Jawa Pos menjadikan Mahasiswa yang sedang berdemo sebagai narasumber. Rico Tude Selaku Koor Umum Aliansi Rakyat Bergerak mengatakan aksi tersebut menyuarakan penolakan terhadap regulasi yang dibuat tanpa melihat kepentingan rakyat.

“Regulasi itu tidak memihak kepentingan rakyat, di antaranya RKUHP, UU KPK, dan UU Pertanahan.”, “Pendapat hanya boleh dilawan dengan pendapat.” (Jawa Pos, 24 September 2019).

Sedangkan koran Kedaulatan Rakyat menjadikan Presiden Joko Widodo sebagai narasumber. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa meminta masyarakat memberi masukan langsung kepada DPR terkait pasal bermasalah.

“Ya, itu tadi saya sampaikan. Itu masukan-masukan yang baik dari masyarakat harus didengar oleh DPR. Sampaikan bawa draf materinya, bawa substansi-substansi yang harus dimasukkan ke DPR.” (Kedaulatan Rakyat, 24 September 2019).

Jawa Pos dalam pemberitaan lebih banyak memasukkan tanggapan mahasiswa sebagai pelaku aksi demo, sedangkan Kedaulatan Rakyat lebih banyak memasukkan tanggapan dari Pemerintah dan DPR atas terjadinya demo tersebut.

Gambar 1.1

Berita Jawa Pos Edisi 24 September 2019



Gambar 1.2

Berita Kedaulatan Rakyat Edisi 24 September 2019



Kedua koran tersebut memberitakan kasus yang sama yaitu tentang aksi demo mahasiswa menolak RKUHP, RUU KPK, dan RUU lainnya, akan tetapi mereka memberitakannya dengan cara yang berbeda. Perbedaan-perbedaan yang muncul, baik pada *lead*, tubuh berita, dan judul merupakan konsekuensi dari adanya *frame* atau pembedaan yang berbeda oleh masing-masing media ketika menyajikan satu fakta yang sama dalam sebuah berita. Perbedaan tersebut diperjelas oleh Nurudin (2007:195-196) bahwa tentang media (khususnya media berita) tidak selalu berhasil memberitahu apa yang kita pikir, tetapi media tersebut benar-benar berhasil memberitahu kita tentang apa. Hal inilah yang kemudian membuat media harus mampu berpikir secara netral tanpa keberpihakan, akan tetapi pada

kenyataannya saat ini media memiliki keberpihakan yang terlihat jelas dari konten berita yang diangkat oleh setiap media.

Kemudian Eriyanto (2002:xii) menambahkan secara detail mengenai peristiwa-peristiwa yang dilaporkan surat kabar, berita sekalipun jelas bukan peristiwa sebenarnya. Proses persepsi selektif yang dilakukan wartawan dan editor, disadari atau tidak, berperan dalam menghasilkan judul berita, ukuran huruf untuk judul, penempatan berita di surat kabar (apakah di halaman depan, dalam, atau belakang) yang menandakan penting atau tidaknya berita, panjang atau pendeknya laporan, komentar mana yang akan ditampilkan dan dibuang, yang sedikit banyak akan menunjukkan keberpihakan surat kabar itu sendiri dan julukan apa yang dipilih surat kabar untuk mempromosikan pihak yang mereka bela atau menyudutkan pihak lain yang mereka benci.

Media memiliki ideologi yang ingin mereka refleksikan melalui berita-berita yang disampaikan, baik ditunjukkan dalam cara penulisan berita, bentuk penceritaan suatu peristiwa atau penentuan fakta mana yang harus ditekankan atau justru dihilangkan. Proses konstruksi realitas yang dilakukan oleh media dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, diantaranya analisis wacana, analisis *framing*, dan analisis semiotika. Analisis *framing* merupakan metode yang sesuai digunakan pada penelitian ini, karena dalam perspektif komunikasi, analisis ini dipakai untuk mengetahui bagaimana cara pandang yang digunakan oleh wartawan berita ketika menyeleksi dan menulis berita.

Framing adalah upaya media untuk menonjolkan pemaknaan atau penafsiran mereka atas suatu peristiwa. Dengan cara apa wartawan atau media melakukannya. Wartawan akan menggunakan seperangkat wacana seperti kata, kalimat, *lead*, hubungan antar kalimat, foto, grafik dan perangkat lain untuk membantu dirinya mengungkapkan pemaknaan mereka sehingga dapat dipahami oleh pembaca (Nugroho,dkk 1999:28).

Pada riset terdahulu yang pernah dilakukan oleh Jaya Priyantoko di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul *Pemberitaan Kasus Penyerangan Di Lapas Cebongan Oleh Oknum KOPASSUS* pada kedua media yang sama yaitu Kedaulatan Rakyat dan Jawa Pos pada 2013 silam, menyebutkan bahwa surat kabar Jawa Pos cenderung lebih menitik beratkan pada titik permasalahan yang sedang terjadi, hal itu dibuktikan dengan lebih banyak sumber berita yang berasal dari TNI atau Kopassus. Sedangkan Kedaulatan Rakyat mendalami suatu berita melalui narasumber yang kebanyakan dari pegawai pemerintah.

Analisis *framing* adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Pada penelitian ini analisis *framing* yang akan digunakan adalah model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, karena analisis *framing* model ini merupakan salah satu dari analisis *framing* yang digunakan untuk memperoleh gambaran isi pesan berita yang disampaikan secara detail. Model analisis ini dibagi dalam empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat *framing* yaitu, struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retorik. Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai *frame* yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide (Sobur, 2015:175).

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Framing Pada Media Cetak Jawa Pos dan Kedaulatan Rakyat tentang Demo Mahasiswa Mengenai Penolakan RKUHP, RUU KPK, dan RUU Lainnya pada Periode 24-27 September 2019”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pbingkaian (*framing*) pemberitaan di media cetak Jawa Pos dan Kedaulatan Rakyat pada periode 24-27 September 2019 mengenai demo mahasiswa tentang penolakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) lainnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan menggunakan analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana struktur sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa, struktur skrip bagaimana wartawan mengisahkan atau menceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita, struktur tematik bagaimana cara wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam kalimat atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan, dan struktur retorik berhubungan dengan bagaimana wartawan menekankan arti tertentu kedalam berita. Tujuan praktis nya adalah untuk mencari hubungan atau perbedaan proses *framing* koran Jawa Pos dan Kedaulatan Rakyat mengenai demo mahasiswa tentang penolakan RKUHP, RUU KPK, dan RUU lainnya.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang bingkai (*frame*) yang digunakan oleh surat kabar Jawa Pos dan surat kabar Kedaulatan Rakyat dalam memberitakan aksi demo penolakan mahasiswa mengenai RKUHP, RUU KPK dan RUU lainnya. Dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan studi komparatif atau studi lanjutan bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh tentang permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran kepada pihak media massa (wartawan) agar dalam menulis berita dapat menanggalkan semaksimal mungkin bias-bias yang mereka anut selama ini dan mendorong masyarakat agar memiliki sikap kritis terhadap informasi yang diterima.

1.5 Kajian Teori

1.5.1 Paradigma Konstruksionis

Menurut Mulyana (2003:9), paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.

Sementara itu, paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruksionis. Paradigma konstruksionis memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural tetapi hasil konstruksi. Paradigma konstruksionis ini lebih memandang komunikasi sebagai produk dan pertukaran makna (Eriyanto, 2002: 37).

Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh sosilog interpretatif, Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, mereka banyak menulis karya dan menghasilkan tesis mengenai konstruksi sosial atas realitas. Tesis utama yang dihasilkan Berger dan Luckmann adalah manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis, dinamis, dan plural secara terus menerus. Menurut Berger dan Luckmann masyarakat tidak lain adalah produk manusia, namun secara terus menerus mempunyai aksi kembali terhadap penghasilnya (*feedback*, manusia dan masyarakat saling membentuk realitas). Sebaliknya, manusia adalah hasil produk dari masyarakat. Teori konstruksi menurut Berger dan Luckmann adalah realitas kehidupan sehari-hari memiliki dimensi yang subjektif dan objektif, realitas tidak dibentuk secara ilmiah, juga tidak diturunkan oleh tuhan. Sebaliknya, realitas itu dibentuk dan dikonstruksi manusia. Pemahaman ini menyiratkan bahwa realitas berwajah ganda atau plural (Eriyanto 2012: 15-18).

Cara pandang paradigma konstruksionis ini berbeda dengan pandangan paradigma positivistik. Jika pandangan positivis menganggap bahwa fakta merupakan sesuatu yang riil, yang diatur oleh kaidah-kaidah tertentu yang bersifat universal, maka pandangan

konstruksionis menganggap bahwa fakta bukanlah hal yang riil, ia merupakan konstruksi atas realitas. Sebab kebenaran suatu fakta selalu bersifat relatif, tergantung dari konteks yang berlaku padanya (Eriyanto, 2002: 23).

Terdapat dua karakteristik penting dari pendekatan konstruksionis, yaitu:

- a. Pendekatan konstruksionis menekankan pada politik pemaknaan dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realita. Dalam hal ini makna bukanlah sesuatu yang absolut atau konsep yang ditafsirkan oleh seseorang dalam suatu pesan.
- b. Pendekatan konstruksionis memandang kegiatan komunikasi sebagai suatu proses yang dinamis. Paradigma ini melihat bagaimana pembentukan pesan dari sisi komunikator dan komunikan serta bagaimana konstruksi individu terhadap pesan tersebut.

Dalam pendekatan konstruksionis, pesan tidak dianggap sebagai *mirror of reality* atau cerminan dari suatu realitas, di mana suatu fakta ditampilkan apa adanya. Dalam produksi suatu pesan, seorang komunikator dengan *frame* realitasnya akan menampilkan fakta-fakta tertentu terhadap suatu peristiwa tersebut. Pesan adalah sesuatu yang dikonstruksikan sehingga makna merupakan produk dari konstruksi dan interaksi antara komunikator dan komunikan (Eriyanto, 2002: 40).

Jika paradigma konstruksionis ini dihubungkan dengan *framing* media, maka kita akan melihat tujuh cara pandang paradigma konstruksionis dalam memandang media. Berikut penjelasannya:

1. Paradigma konstruksionis memandang bahwa fakta atau realitas merupakan hasil konstruksi. Hal ini terjadi karena fakta atau realita yang ditampilkan oleh media merupakan fakta-fakta yang dipilih oleh wartawan dari suatu peristiwa atau isu tertentu.

2. Paradigma ini memandang bahwa media merupakan agen konstruksi. Media merupakan sarana di mana pesan disebarluarkan kepada khalayak. Dalam proses ini, media bukanlah sekedar saluran yang netral, ia merupakan subjek yang mengkonstruksi realita lengkap dengan pandangan-pandangannya, bias, dan pemihaknya.

3. Paradigma konstruksionis melihat bahwa berita tidak bersifat netral, melainkan bersifat subjektif atas suatu peristiwa. Subjektifitas berita atas suatu peristiwa terjadi karena dalam meliput suatu peristiwa wartawan tidak bisa lepas dari perspektif-perspektif subjektif dalam memaknai suatu peristiwa yang terjadi.

4. Paradigma konstruktif melihat bahwa wartawan merupakan agen konstruksi. Hal ini bertentangan dengan pandangan positivistik yang melihat bahwa wartawan merupakan pelapor dari suatu peristiwa. Dalam paradigma konstruksionis, wartawan tidak hanya menulis suatu peristiwa saja, tetapi ia juga membentuk berita.

5. Paradigma konstruktif melihat bahwa pilihan moral, etika, dan keberpihakan wartawan merupakan bagian yang integral dalam produksi berita. Dalam peliputan suatu peristiwa, wartawan akan melakukan konstruksi terhadap realita yang terjadi.

6. Paradigma konstruksionis melihat bahwa nilai, etika, dan pilihan moral merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu penelitian. Nilai, etika, dan pilihan moral merupakan alat yang digunakan peneliti dalam mengkonstruksi realita yang ditelitinya.

7. Konstruksionis melihat bahwa khalayak memiliki penafsiran tersendiri atas suatu berita. Dalam pandangan positivistik, berita bersifat objektif sehingga pesan yang ditulis wartawan dimaknai sama oleh pembaca. Dalam hal ini, pembaca atau khalayak dianggap pasif. Hal ini berbeda dengan paradigma konstruksionis yang melihat bahwa setiap individu memiliki penafsiran yang berbeda atas suatu berita. Dalam hal ini, khalayak dianggap aktif (Eriyanto, 2002:41).

Dengan demikian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa berita-berita yang kita terima sehari-hari merupakan hasil akhir dari proses panjang di mana semua elemen dalam surat kabar, memproduksi dan mengolah suatu informasi menjadi sesuatu yang dalam paradigma ini diyakini bahwa itu adalah bukan realitas sebenarnya, melainkan hasil daripada konstruksi. Secara sederhana kita bisa membedakan antara satu surat kabar dengan surat kabar lainnya dalam hal pemberitaan. *Jawa Pos* dan *Kedaulatan Rakyat* merupakan dua surat kabar yang berbeda, hal itu akan berdampak bagaimana masing-masing media memproduksi suatu berita.

1.5.2 Berita Dalam Pandangan Konstruksionis

Berita atau *news* adalah sebuah kata yang tentu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat yang sering mengikuti informasi. Hampir setiap hari semua media massa baik itu media cetak maupun elektronik menyajikan berbagai macam berita untuk dinikmati oleh masyarakat. Ada beberapa definisi berita menurut beberapa tokoh jurnalis, berikut definisinya:

- a. Menurut Paul D. Maessenner, berita adalah sebuah informasi yang baru tentang suatu peristiwa yang penting dan menarik minat. Berita radio dapat pula berarti, apa yang terjadi saat ini, apa yang segera terjadi dan apa yang akan terjadi.
- b. Menurut Prof. Mitchel V. Charnley, berita adalah laporan tentang fakta dan opini yang menarik perhatian dan penting yang dibutuhkan masyarakat.
- c. Menurut Curtis Beckman, Post President RTNDA, berita adalah sebagai laporan atas opini atau peristiwa yang penting bagi sejumlah besar khalayak. berita yang besar adalah liputan opini atau peristiwa yang sangat dibutuhkan oleh orang banyak.
- d. Menurut The New Grolier Webster International Dictionary, berita adalah informasi hangat tentang suatu yang telah terjadi atau tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya, informasi yang disajikan oleh media massa, dan sesuatu atau orang sebagai subjek yang layak diberitakan oleh media (Syahputera, 2006: 20-21).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa berita adalah suatu informasi yang bersifat aktual (sementara terjadi atau baru terjadi), bersifat penting, menarik perhatian masyarakat, bukan suatu tulisan yang bersifat subjektif wartawan. Semua peristiwa penting yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi dapat menjadi berita. Paham *Bad News is a Good News* juga sering digunakan guna memburu berita, dalam arti memberitakan sisi buruk merupakan wacana yang menarik disimak dan melupakan sisi baiknya peristiwa (Suryawati, 2011: 69).

Menurut Shoemaker dan Reese (dalam Eriyanto, 2002: 105) menjelaskan bahwa secara umum terdapat empat unsur yang harus ada dalam suatu pemberitaan, yaitu:

- a. *Prominance*, yaitu nilai berita diukur dari kebesaran peristiwanya atau arti pentingnya. Peristiwa yang diberitakan adalah peristiwa yang dipandang penting.
- b. *Human Interest*: peristiwa lebih memungkinkan disebut berita kalau peristiwa itu banyak mengandung unsur haru, sedih, dan meguras emosi khalayak.
- c. *Confict/Controversy*: peristiwa yang mengandung konflik lebih potensial disebut berita dibandingkan dengan peristiwa yang biasa-biasa saja.

- d. *Unusual*: berita mengandung peristiwa yang tidak biasa, peristiwa yang jarang terjadi.
- e. *Proximity*: Peristiwa yang dekat lebih layak diberitakan dibandingkan dengan peristiwa yang jauh, baik dari fisik maupun emosional khalayak.

Kemudian, menurut Sedia W. Barus, ada beberapa rumusan yang dijadikan pedoman menulis berita dalam praktik jurnalistik yaitu rumusan 5W+1H. Rumusan ini pertama kali diperkenalkan oleh Kantor Berita Associated Press (AP), rumusan ini juga disebut sebagai syarat yang harus terpenuhi dalam penulisan berita. Berikut penjelasan rumusan 5W+1H:

- a. *Who*: berita harus mengandung unsur “siapa”. Ini dapat ditarik ekuivalensinya dengan *prominence*: harus menyebut sumber yang jelas. Jadi, di sini penekannya adalah sumber berita itu. “siapa” bisa mengacu pada individu, lembaga, atau kelompok.
- b. *What*: setelah mengetahui sumber berita, selanjutnya penting untuk mengetahui “apa” yang dikatakan: *who to say*. Dengan kata lain, “apa” adalah mencari tahu hal yang menjadi topik berita tersebut.
- c. *Where*: berita juga harus menunjuk pada tempat kejadian. “di mana” terjadinya peristiwa atau fakta itu. ini merupakan bagian dari unsur “jarak” (*proximity*).
- d. *When*: unsur penting berikutnya yang harus dikandung sebuah berita adalah “kapan” terjadinya peristiwa tersebut. Unsur “kapan” inilah yang juga dimaksudkan dengan unsur baru terjadi (*timeliness*).
- e. *why*: kelengkapan unsur sebuah berita harus dapat menjelaskan “mengapa” peristiwa itu sampai terjadi. Hal ini berkaitan dengan tujuan untuk memenuhi rasa ingin tahu pembaca mengenai penyebab terjadinya suatu peristiwa.
- f. *How*: “bagaimana” terjadinya suatu peristiwa juga sangat dinantikan oleh pembaca. Masyarakat yang sudah mengetahui mengapa suatu peristiwa terjadi tentu akan menuntun lebih jauh lagi “bagaimana” persisnya peristiwa itu terjadi (Barus, 2010: 36).

Selanjutnya, berita juga dibagi dalam beberapa jenis dan struktur berita, setiap jenis berita memiliki fungsi dan penempatan masing-masing. Berikut penjelasan jenis-jenis berita:

- a. *Straight News* atau berita langsung, dalam perkembangannya kemudian sering hanya disebut berita. *Straight News* dibuat untuk menyampaikan fakta yang baru dan harus segera diketahui masyarakat. Hal yang paling penting dalam *straight news* adalah aktualitas, karena persaingan media, fakta harus secepat mungkin dipublikasikan, jika terlambat sudah tidak aktual lagi (karena mungkin telah dimuat di media lain).
- b. *Soft News* atau berita ringan, jenis ini tidak mengutamakan aktualitas, tapi menekankan aspek manusiawi (*human interest*) dalam suatu peristiwa. Hal yang

perlu diperhatikan dalam *soft news*, penulis tidak perlu mengungkapkan secara detail, cukup hanya permukaan saja.

- c. *Feature*, berita kisah, khas. Merupakan jenis tulisan mengenai suatu fakta yang dapat menambah pengetahuan pembaca dan atau menyentuh perasaan pembaca. Jenis berita ini tidak terpengaruh pada unsur aktualitas, yang diutamakan adalah detail suatu berita. Unsur terpenting dalam penulisan *feature* adalah sisi manusiawi. *Feature* tidak melulu mengenai orang, tapi juga bisa mengenai peristiwa, atau tempat. Bahasa yang digunakan dikemas agar segar, ringan, dan menarik. *Feature* juga sering disebut berita kisah, karena penulisannya yang naratif, seperti orang bertutur atau bercerita (Faqih, 2001: 42-43).

Konstruksi berita pada dasarnya merupakan sebuah kesatuan informasi verbal dan visual yang didistribusikan secara kuantitatif dan kualitatif di dalam konten media. Sisi kuantitatif dapat dilihat melalui frekuensi kemunculan berita tersebut, jumlah istilah atau pemakaian istilah dalam berita, serta durasi berita tersebut. Sisi kualitatif dilihat dari persepsi khalayak terhadap berita. Namun secara umum, segi kualitatif ini biasanya memperhatikan unsur objektivitas (melihat realitas media dan realitas sosial) dan faktualitas (muatan kebenaran berdasarkan fakta relevan). Kedua unsur ini sering mendapat sorotan karena proses penyusunan berita itu sendiri menerima banyak pengaruh dari berbagai pihak. Pihak media memiliki ideologi yang ingin mereka refleksikan melalui berita-berita yang mereka sampaikan, yang ditunjukkan dalam cara penulisan berita, bentuk penceritaan suatu peristiwa, atau penentuan fakta mana yang harus ditekankan atau justru dihilangkan. Realitas yang dikonstruksikan oleh media sering kali diadopsi oleh masyarakat menjadi realitas sosial yang ada, sehingga unsur objektivitas sedikit dipertanyakan akibat ada unsur kepentingan (Syahputera, 2006: 53).

Dalam konteks ini, berita yang disampaikan oleh surat kabar Jawa Pos dan Kedaulatan Rakyat mengenai aksi demo mahasiswa tentang penolakan RKUHP, RUU KPK, dan RUU lainnya pada edisi 24-27 September 2019 adalah merupakan hasil konstruksi realita yang dilakukan oleh institusi media. Sebuah teks berita dalam penulisan dan pemaparannya tidak langsung mengarah pada suatu realita. Teks tersebut terlebih dahulu diolah sedemikian rupa

oleh institusi media untuk menunjukkan suatu konstruksi tertentu atas realita yang terjadi. Oleh karena itu, konstruksi realitas yang dilakukan wartawan untuk mempengaruhi kita pada pemaknaan wartawan terhadap suatu peristiwa, ditambah ideologi media massa tempat wartawan bekerja dibangun sesuai visi dan kepentingan perusahaan yang bersangkutan. Ada beberapa tahapan penting yang cukup berpengaruh terhadap bagaimana media mengkonstruksi sebuah realitas melalui berita, yaitu proses penyeleksian berita dan proses pembentukan berita. Proses seleksi melalui beberapa tahap, seleksi dari wartawan meliputi penyeleksian isu dan fakta, lalu seleksi laporan mana yang akan diserahkan kepada redaktur. Di redaktur kembali ada seleksi, mana yang perlu disunting, ditambah atau dikurangi. Selain itu, proses pembentukan berita sangat ditentukan oleh wartawan, wartawanlah yang mengkreasi sebuah berita (Eriyanto, 2002: 102).

1.5.3 Pers

Media massa atau juga dikenal sebagai pers merupakan istilah yang digunakan ditahun 1920-an untuk memperkenalkan jenis media yang secara khusus dirancang untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Menurut Will Schrahmn dalam bukunya *Four Theoris Of The Pers* yang mengemukakan empat teori pers, yaitu *The Authotarian*, *The Libertarian*, *The Social Responsibility*, dan *The Soviet Communist Theory*. Ke-empat teori tersebut mengacu pada suatu pengertian pers sebagai pengamat, guru dan forum yang menyampaikan pandangannya tentang banyak hal yang mengemuka ditengah masyarakat (Tamburaka, 2013:39-41).

Di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, sebagaimana telah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982, pers adalah lembaga kemasyarakatan, alat perjuangan nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya,

diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya (DjuROTO, 2002:4).

Terdapat empat poin penting yang wajib dilakukan pers untuk memelihara kebebasannya (Manan, 2010: 4-6), berikut empat poin tersebut:

1. Mengembangkan dan memelihara demokrasi. Tidak akan ada kebebasan pers tanpa demokrasi.
2. Memelihara dan mengembangkan negara hukum. Hukum yang dimaksudkan di sini merupakan hukum dalam arti substantif maupun prosedural.
3. Pers sendiri dan atas kemauan sendiri senantiasa memelihara tanggung jawab dan disiplin. Hal ini berkaitan dengan kode etik pers sebagai aturan disiplin dan aturan moral.
4. Kebebasan pers merupakan kehormatan karena hal itu merupakan hasil perjuangan dan hasil kerja keras sehingga harus dipelihara integritasnya.

Kemudian Satia (2018:124) menambahkan bahwa pers di Indonesia dan di masyarakat masing-masing memiliki fungsi dan peranan. Berikut fungsi dan peranan pers di masyarakat:

- a. Memberikan informasi,
- b. Memberikan kontrol,
- c. Menghubungkan atau menjembatani suara-suara rakyat, memberikan hiburan, dan menambah wawasan.

Adapun fungsi dan peranan pers di Indonesia, yaitu:

1. Media sebagai saluran formasi kepada masyarakat,
2. Media sebagai saluran bagi opini publik dan debat publik,
3. Media sebagai saluran investigasi terhadap masalah-masalah publik,
4. Media sebagai saluran pembelajaran,
5. Media sebagai saluran kebijakan publik kepada masyarakat dan program pemerintah,
6. Memajukan kesejahteraan bangsa.

Sebagai institusi sosial, pers berkembang berdasarkan prinsip-prinsip jurnanisme yang diemban oleh pengelolanya. Bill Kovach dan Tom Rosentiel (dalam Supriyanto, dkk, 2007:102) menyebutkan ada sembilan prinsip dasar jurnanisme, yaitu:

1. Kewajiban jurnanisme adalah pada kebenaran,
2. Loyalitas pertama jurnanisme adalah kepada warga masyarakat,
3. Intisari jurnaslisme adalah disiplin dan vertifikasi,
4. Para praktisnya harus menjaga independensi dari sumber berita,
5. Jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan,
6. Jurnalisme harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan terhadap warga,
7. Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting, menarik, dan relevan,
8. Jurnalisme harus menjada berita komprehensif dan proposional,
9. Para praktisinya harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka. Karena jurnalisme adalah kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menyebarluaskan berita melalui media berkala kepada khalayak seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya, maka prinsip-prinsip jurnanisme tersebut dikemas dalam bentuk lima kata kunci pegangan operasional jurnanisme sehari-hari, yaitu akurat, objektif, fair, seimbang, dan tidak memihak.

Pers bebas adalah suatu tradisi. Ia tidak hadir begitu saja, butuh puluhan dan bahkan ratusan tahun untuk meraih dan mempertahankannya. Tradisi itu dibangun atas kesadaran bahwa pers adalah sesuatu yang diberikan masyarakat kepada institusi pers. Pemberian itu, suatu saat bisa dicabut kembali bila orang-orang pers tidak bisa memfungsikannya secara benar. Oleh karena itu pers bekerja agar kebebasan itu tidak lepas dari genggamannya. Inilah yang melatari lahirnya prinsip-prinsip jurnanisme, kode etik dan kode perilaku, apapun mediana (Supriyanto, dkk, 2007:102).

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis *framing* dan menggunakan paradigma konstruksionis. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan, terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami (Ardial, 2015: 249). Sedangkan menurut Kriyantono (2008: 56) penelitian kualitatif adalah riset yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.

Dalam penelitian ini analisis *framing* digunakan untuk mengungkap konstruksi yang dilakukan oleh surat kabar Jawa Pos dan surat kabar Kedaulatan Rakyat tentang pemberitaan tentang aksi demo mahasiswa mengenai penolakan RKUHP, RUU KPK, dan RUU lainnya. Analisis *framing* dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Konstruksi inilah yang menentukan akan dibentuk seperti apa suatu berita ke dalam sebuah media. Pemahaman dan konstruksi atas suatu peristiwa bisa jadi berbeda antara satu media dengan media yang lainnya (Eriyanto, 2002: 70).

1.6.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pemberitaan tentang demonstrasi mahasiswa terkait penolakan RKUHP, RUU KPK, dan RUU lainnya di media cetak Jawa Pos dan Kedaulatan Rakyat dari tanggal 24 sampai dengan 27 September 2019. Penelitian ini akan memfokuskan pemberitaan selama 24 sampai dengan 27 September 2019 karena demo mahasiswa puncaknya berjalan pada tanggal, bulan, dan tahun itu, sehingga isu tersebut menjadi

perhatian dan ramai diberitakan oleh media massa khususnya media cetak Jawa Pos dan Kedaulatan Rakyat. Objek berita akan dimuat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2

Daftar berita media cetak Jawa Pos dan Kedaulatan Rakyat

No.	Koran Jawa Pos		Koran Kedaulatan Rakyat	
	Tanggal berita	Judul berita	Tanggal berita	Judul berita
1.	Selasa, 24 September 2019	1. Serentak Menggugat Rezim.	Selasa, 24 September 2019	1. 'Gejayan Memanggil' Bebas Intervensi Politik. 2. Jokowi: Silahkan Masyarakat Beri Masukan.
2.	Rabu, 25 September 2019	1. Mahasiswa Babak Belur.	Rabu, 25 September 2019	1. Polisi Tembakkan Gas Air Mata DPR Tunda Pengesahan RKUHP.
3.	Kamis, 26 September 2019	1. Perlawanan terus berlanjut. 2. Pemerintah Sebut Perppu KPK Tidak Mendesak.	Kamis, 26 September 2019	1. Komnas HAM Mencatat Adanya Kekerasan, Kerusuhan Bukan Perbuatan Mahasiswa. 2. Terkait RUU KUHP, DPR Bakal Tinjau Kembali.
4.	Jum'at, 27 September 2019	1. Jangan Ragu Rilis Perppu. 2. Jokowi Tolak Terbitkan Perppu KPK.	Jum'at, 27 September 2019	1. Jokowi Pertimbangkan Terbitkan perppu KPK.

Sumber : *Koran Jawa Pos dan Kedaulatan Rakyat edisi 24-27 September 2019.*

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang ada akan dikumpulkan dengan teknik dokumentasi (Moleong, 2008:68), yaitu teknik yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen dan catatan yang berhubungan dengan unit analisis, sehingga dapat dipergunakan dalam melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, ada dua jenis data yang akan digunakan (Suryabrata, 2010:38), yaitu:

a. Data Primer (*Primary-Sources*)

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumbernya. Dalam penelitian ini data primer menggunakan Surat Kabar Jawa Pos dan Kedaulatan Rakyat mengenai keberpihakan media dalam pemberitaan tentang aksi demo mahasiswa mengenai penolakan RKUHP, RUU KPK, dan RUU lainnya pada periode 24 September – 27 September 2019.

b. Data Sekunder (*Secondary-Sources*)

Data sekunder yaitu data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen atau arsip. Dalam penelitian ini data sekunder akan berupa referensi buku, jurnal, makalah dan sumber lain seperti internet.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *framing*. Analisis *framing* dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya (Sobur, 2012: 164). Analisis *framing* digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana surat kabar Jawa Pos dan surat kabar Kedaulatan Rakyat membingkai pemberitaan mengenai aksi demo mahasiswa menolak RKUHP, RUU KPK, dan RUU lainnya. Melalui analisis *framing* juga ingin mengetahui bagaimana konstruksi media cetak Jawa Pos dan Kedaulatan Rakyat dalam memberitakan aksi demo mahasiswa menolak RKUHP, RUU KPK, dan RUU lainnya.

Pada penelitian kali ini akan menggunakan metode analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Peneliti memilih model Pan dan Kosicki, karena model ini menyajikan alat yang lebih detail dalam menganalisis suatu berita. Berbeda dengan analisis *framing* model lainnya, seperti model Entman dan Edelman serta model Gamson. Model Entman dan Edelman dalam perangkat *framing* nya tidak merinci secara detail mengenai elemen retorik, meskipun dalam tingkatan analisisnya mereka menunjukkan bagaimana kata, kalimat atau gambar dapat dianalisis sebagai bagian integral memahami *frame*, tetapi mereka tidak mengajukan gambaran detail mengenai elemen retorik tersebut. Kemudian, model Entman dan Edelman ini lebih bergerak pada level bagaimana peristiwa dipahami dan bagaimana pemilihan fakta yang dilakukan oleh media. Sedangkan, model Gamson dalam perangkat *framing* nya yang banyak ditekankan adalah penandaan dalam bentuk simbolik baik lewat kiasan maupun retorika yang secara tidak langsung mengarahkan perhatian khalayak. Jika dibandingkan dengan analisis *framing* model Entman dan Edelman serta model Gamson ini, analisis *framing* model Pan dan Kosicki dalam perangkat *framing* nya lebih terperinci dengan menggunakan pendekatan linguistik dengan memasukan elemen seperti pemakaian kata, pemilihan struktur, dan bentuk kalimat yang mengarahkan bagaimana peristiwa dibingkai oleh media (Eriyanto, 2012: 329). Dengan demikian, melihat perbedaan model di atas maka model Pan dan Kosicki ini cocok untuk menganalisis berita surat kabar Jawa Pos dan surat kabar Kedaulatan Rakyat yang memiliki perbedaan latar belakang dan perbedaan dalam membingkai pemberitaan tentang aksi demo mahasiswa menolak RKUHP, RUU KPK, dan RUU lainnya.

Dalam pendekatan analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki perangkat *framing* dibagi kedalam empat struktur besar. Yaitu:

Tabel 1.3

Skema perangkat *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki

STRUKTUR	PERANGKAT FRAMING	UNIT YANG DIAMATI
SINTAKSIS, Cara wartawan menyusun berita.	1. Skema berita.	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan, penutup.
SKRIP, Cara wartawan mengisahkan fakta.	2. Kelengkapan berita.	5W + 1H.
TEMATIK, Cara wartawan menulis fakta.	3. Detail, 4. Koheresi, 5. Bentuk kalimat, 6. Kata ganti.	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat.
RETORIS, Cara wartawan menekankan fakta.	7. Leksikon, 8. Grafis, 9. Metafora.	Kata, idiom, gambar/foto, grafik.

Sumber: Sobur, 2012: 176.

a. Struktur Sintaksis

Struktur Sintaksis dapat diamati dari bagan berita. Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa, (pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa) menjadi sebuah berita. Elemen sintaksis memberi petunjuk yang berguna tentang bagaimana wartawan memaknai peristiwa dan hendak kemana berita tersebut akan dibawa. Bentuk sintaksis yang paling populer adalah pramida terbaik yang dimulai dengan judul *headline*, *lead*, episode, latar dan penutup. Dalam bentuk ini bagian yang diatas ditampilkan lebih penting dibanding bagian bawahnya.

b. Struktur Skrip

Struktur Skrip melihat bagaimana wartawan mengemas suatu peristiwa. Laporan berita sering disusun sebagai sesuatu cerita. Hal ini disebabkan 2 hal yaitu pertama

untuk menunjukkan hubungan antara peristiwa satu dengan sebelumnya, kedua untuk penghubung teks yang ditulis dengan lingkungan komunal pembaca. Bentuk umum dari struktur skrip ini adalah 5W+1H, *Who, What, When, Where, Why, dan How*.

c. Struktur Tematik

Struktur Tematik yaitu cara pandang wartawan atas suatu peristiwa kepada proposisi, kalimat, atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Struktur tematik berhubungan dengan bagaimana fakta ditulis dalam suatu berita.

d. Struktur Retoris

Struktur Retoris berhubungan dengan cara wartawan menekankan arti tertentu yang digambarkan dari pilihan gaya atau kata. Wartawan menggunakan perangkat retorik untuk membuat citra, meningkatkan penonjolan pada sisi tertentu dan meningkatkan gambaran yang diinginkan dari suatu berita. Terdapat beberapa elemen dalam struktur retorik diantaranya lesikon, pemilihan dan pemakaian kata untuk menandai atau menggambarkan peristiwa. Selain melalui kata penekanan dapat dilakukan melalui grafis berupa gambar, tabel, foto (Eriyanto, 2002:293:306).

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab. Pada bab pertama ialah:

Pada Bab I, berisi pendahuluan yang akan membahas latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan tinjauan pustaka yang digunakan untuk penelitian, metodologi penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II, adalah bab yang berisi tentang mengenai gambaran umum penelitian atau profil dari objek penelitian, yaitu surat kabar Jawa Pos, dan Kedaulatan Rakyat.

Bab III, akan memaparkan mengenai analisis dan seluruh data-data yang telah diperoleh peneliti di surat kabar Jawa Pos dan Kedaulatan Rakyat mengenai demo mahasiswa tentang penolakan RKUHP, RUU KPK, dan RUU lainnya periode 24-27 september 2019 dengan menggunakan model analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

Terakhir, Bab IV akan berisi tentang kesimpulan terkait hasil analisis framing pada surat kabar Jawa Pos dan Kedaulatan Rakyat yang telah dilakukan, sehingga dapat diketahui bagaimana kedua media cetak tersebut membingkai pemberitaan mengenai pemberitaan tentang demo mahasiswa mengenai penolakan RKUHP, RUU KPK, dan RUU lainnya periode 24-27 September 2019.